

BAB I

PENDAHULUAN

Pada tahun 2007 pemerintah Perancis memberlakukan kebijakan baru untuk mengatur imigrasi di Perancis, kebijakan baru tersebut diberi nama *France Immigration and Integration Law*. Adapun tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk memperketat masuknya para imigran ke Perancis dan bagi imigran yang telah berada di Perancis diperlukan sejumlah persyaratan khusus untuk tetap bisa tinggal di wilayah Perancis.

A. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi ini akan membahas tentang kebijakan Pemerintah Perancis di era Nicolas Sarkozy dalam menangani imigran yang datang maupun yang telah berada di Perancis. Dibawah pimpinan Nicolas Sarkozy kebijakan dikeluarkan *France Immigration and Integration Law*. Tujuan diberlakukannya undang-undang imigrasi ini untuk mengurangi jumlah imigran di Perancis dan serta memperketat masuknya orang luar Perancis dengan membuat persyaratan tertentu. Selain itu, dengan pengaruhnya Sarkozy membuat kebijakannya tersebut untuk di ikuti oleh semua negara anggota Uni Eropa. Selama kepemimpinannya, Sarkozy telah mendeportasi sebanyak 25 ribu imigran setiap tahunnya.

Persoalan imigran di era Nicolas Sarkozy banyak mendapat pertentangan dari dunia Internasional akibat kebijakan yang diusulkannya. Menurut Sarkozy, sejak adanya kesepakatan Schengen tak ada lagi pemeriksaan di perbatasan dan kini orang dapat bergerak bebas di Eropa. Oleh sebab itu, negara anggota Uni Eropa perlu memiliki persyaratan yang sama untuk para calon migran. Prancis yang menjadi Ketua Dewan Uni Eropa saat itu, juga mendesak agar badan penjaga perbatasan Uni Eropa, Frontex diperkuat. Selain itu, penjagaan di laut Tengah serta pesisir Afrika Barat ditingkatkan. Para aktivis Hak Asasi Manusia dan organisasi bantuan pengungsi mengecam Uni Eropa yang dinilai menjadikan Eropa sebagai benteng tertutup.

Selain itu selama kebijakan yang dibuat oleh Nicolas Sarkozy yang sampai sekarang masih berlaku di Perancis adalah berupa pelarangan mengenakan hijab bagi muslimah. Hal tersebut memicu protes keras dari kalangan kelompok minoritas muslim yang jumlahnya sekitar 5 juta jiwa, bahwa kebijakan tersebut adalah suatu pelanggaran hak azasi manusia dan umat islam selama kepemimpinannya semakin mendapat perlakuan yang diskriminatif. Banyaknya imigran yang berdatangan dari Afrika Utara seperti Aljazair, Tunisia dan Maroko. Pada tahun 2005 Menurut Institut National d'Etudes Demographiques jumlah imigran asal Afrika Utara tersebut mencapai 1.516.000 juta jiwa. Keberadaan imigran asal Afrika Utara dalam jumlah yang besar tersebut menjadi permasalahan tersendiri di Perancis. Karena imigran

yang datang tersebut, memiliki latar belakang yang berbeda dengan orang asli Prancis.

Negara Prancis ingin di konstruksi sebagai Negara yang maju, Putih dan Kristen sedangkan imigran yang datang adalah imigran-imigran dengan latar belakang Muslim, hitam, dan miskin. Fenomena banyaknya para imigran di Prancis telah marak sejak abad 20. Letak Prancis yang tidaklah berjauhan dari kawasan Asia dan Afrika dan ditambah dengan bahasa Prancis yang banyak digunakan di Negara-negara Afrika karena bekas jajahan Prancis menambah alasan para imigran untuk berdatangan ke Prancis.

Ketertarikan penulis untuk mengkaji penelitian ini adalah bahwa Prancis merupakan Negara di Eropa Barat yang banyak menerima para imigran dan memiliki permasalahan yang kompleks terhadap para imigran, seperti isu rasisme, sentiment agama dan kecemburuan social antara penduduk asli Prancis dan penduduk imigran. Penulis melihat dan sekaligus mengamati fenomena migrasi yang ada di Prancis ternyata menyimpan banyak perdebatan, baik itu perdebatan positif dan negatif dari para elit politik di Negara tersebut.

Alasan lainnya yaitu bahwa masalah para imigran ini adalah masalah yang masih dianggap serius di Prancis. Aksi terorisme di tahun 2014 dengan melakukan penyanderaan terjadi di Prancis, dan aksi tersebut dilakukan oleh oknum yang berasal dari kalangan imigran dan beragama islam. Hal tersebut kembali memicu

sentimen antara kalangan warga asli Perancis dan warga imigran terutama imigran yang beragama Islam. Selanjutnya adalah bahwa masalah-masalah yang berkaitan dengan imigran banyak dimuat di berita internasional sehingga penulis menyadari bahwa Perancis adalah salah satu Negara yang dapat diteliti kebijakannya mengenai penanganan imigran.

Prancis juga merupakan Negara terbesar kedua bahasa yang digunakan di dunia, karena selain Prancis juga Negara-negara Afrika yang sebagian besar bekas jajahan Prancis menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa nasional mereka. Prancis juga sangat serius terhadap isu-isu budaya dan pelestarian bahasa Prancis di dunia Internasional, menyaingi Bahasa Inggris sebagai bahasa yang paling populer didunia.

Kepopuleran Prancis juga terus meningkat dengan adanya isu imigran para imigran yang masuk dengan jumlah yang besar. Tidak dipungkiri juga bahwa jumlah imigran yang masuk di Prancis terus meningkat dan populasi imigran di Prancis yang semakin meningkat lebih dari 10 persen.

B. Latar Belakang

Pada awalnya masalah imigrasi bukanlah masalah krusial di Prancis. Bahkan ada saat dimana Prancis membuka wilayahnya untuk para imigran. Setelah Perang Dunia II Prancis mengalami kekurangan tenaga kerja dan pada saat itu Prancis membuat kebijakan yang ramah bagi para imigran.

Sejak tahun 1999, Perancis menerima pendatang lebih banyak dari Negara-negara tetangga yaitu Eropa Timur (Bryant 2011). Negara tetangga ini sebenarnya hanya menjadi pintu masuk para imigran dari Afrika dan Timur Tengah menuju Perancis. Karena apabila diperhatikan berdasarkan letak geografis, Perancis berbatasan langsung dengan Laut Mediterania dan Italia (Eropa Timur). Sebagian besar imigran yang berasal dari Afrika, khususnya Tunisia dan Libya, Morocco masuk ke Perancis melalui Italia dan juga Laut Mediterania.

Sebelum tahun 2000, Perancis merupakan sebuah negara Eropa dan Negara anggota Uni Eropa yang dikenal sebagai negara yang terbuka menerima imigran atau pendatang dari berbagai negara. Namun di sisi lain, Perancis juga merupakan negara anggota Uni Eropa yang dikenal sebagai negara dengan tindak diskriminasi terhadap imigran cukup tinggi. Latar belakang diskriminasi ini, dari pihak Perancis sebenarnya didasari atas tingkat kriminalitas yang tinggi serta munculnya perpecahan di dalam masyarakat.

Tercatat bahwa jumlah imigran di Perancis terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 11% dari total jumlah penduduk Perancis 60 juta jiwa pada tahun 2007. Berdasarkan data yang diperoleh telah terjadi peningkatan kriminalitas akibat imigran sebesar 10-15% setelah tahun 2000. (G. N. Sari, Personalitas Presiden Nicholas Sarkozy dan Kebijakan Terhadap Kaum Imigran di Perancis 2013)

Perbedaan yang cukup mencolok tersebut memunculkan pengkotak-kotakan masyarakat. Ada yang menerima dan menolak terhadap keberadaan imigran asal Afrika Utara tersebut. Sehingga, asimilasi (pembauran) antara imigran dan warga asli Perancis susah untuk dilakukan. Sejak diberlakukan mata uang tunggal Eropa (Euro), negara-negara kaya seperti Jerman dan Perancis mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi, disertai gejala inflasi dan pengangguran yang tinggi. Tingginya pengangguran, selain karena melambatnya pertumbuhan ekonomi, juga karena meningkatnya mobilitas pasar tenaga kerja yang mengakibatkan pasar mengalami kelebihan penawaran (over supply). Pekerja murah asal Eropa Timur telah membuat tingkat upah di beberapa negara seperti Jerman dan Perancis tidak kompetitif lagi. Selanjutnya, gejala pemindahan pabrik (delokalisasi) ke kawasan Eropa Timur kian tak terbendung.

Sebaliknya, serikat-serikat buruh di Perancis kian rajin turun ke jalan, menuntut peningkatan upah, penurunan jam kerja atau berbagai tuntutan perbaikan fasilitas lainnya. Semakin keras buruh menuntut, kian banyak pabrik pindah. Konsekuensinya, pengangguran akan terus naik. Pada akhirnya, muncul banyak konflik yang di latarbelakangi kecemburuan secara sosial maupun ekonomi. Pada November 2005 terjadi sebuah kerusuhan yang cukup besar sepanjang sejarah imigrasi Perancis.

Kerusuhan tersebut disebabkan oleh warga imigran yang tidak puas dengan nasibnya. Kerusuhan tersebut pada awalnya terjadi di pinggiran kota Perancis dan

meluas sampai ke pusat kota. Kerusakan tersebut menelan banyak korban jiwa, kerugian materi mencapai 200.000 Euro dan banyak fasilitas umum yang rusak akibat kerusakan tersebut. Sebagai bentuk respon dari permasalahan yang muncul tersebut, pada Maret 2006, Menteri Dalam Negeri Perancis Nicolas Sarkozy berinisiasi untuk membuat sebuah skema kebijakan baru terkait imigrasi. Kerusakan sosial kali ini mencerminkan keretakan sosial yang serius akibat gagalnya proses integrasi para imigran generasi kedua yang umumnya berasal dari Arab dan Afrika Utara. Para pendatang merasa diperlakukan secara rasial, sementara penduduk asli menganggap para imigran sebagai benalu. Banyak imigran menjadi penganggur dan menikmati berbagai tunjangan sosial dari pemerintah. Sebagian orang Perancis menggerutu, karena tunjangan sosial itu berasal dari pajak yang mereka bayarkan.

Presiden Nicholas Sarkozy memiliki pandangan dan gaya kepemimpinan yang cenderung berbeda dengan presiden sebelumnya, Jacques Chirac. Nicholas Sarkozy mencoba mencari dukungan dari sayap kanan dalam proses pencalonannya di tahun 2007, yang tak lain halnya memiliki kesamaan yaitu sensitif dan tidak menyukai adanya imigran di Perancis. Hal ini pula dianggap sebagai suatu hal baru oleh warga Perancis karena setelah sebelum-sebelumnya presiden Perancis merupakan representatif dari sayap kiri. Selain itu juga bahwa Nicholas Sarkozy merupakan presiden pertama di Perancis yang berasal dari keluarga dengan garis keturunan seorang imigran (Nicolas Sarkozy - President (non-U.S.) - Biography.com 2015).

Presiden Prancis Nicolas Sarkozy yang pada tahun 2007 yang bersifat agresif dengan para imigran. Kebijakan pemulangan besar-besaran pada imigran setiap tahunnya. Tiga poin penting yang terdapat pada *French Immigration and Integration Law* yaitu (1) penyeleksian imigran (*immigration choisie*), (2) integrasi 'mandat' (*mandatory immigration*), (3) pembangunan (*co-development*).

Jika dikaitkan dengan permasalahan demografi yang ada di Eropa bahwa Uni Eropa tengah menghadapi permasalahan yang sangat penting dan menyangkut kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Permasalahan tersebut adalah jumlah penduduk di usia produktif lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tua. Pada tahun 2010, jumlah penduduk di usia muda (0 – 14 tahun) memberi kontribusi sebanyak 15,6% dari keseluruhan jumlah populasi di 27 negara anggota Uni Eropa, jumlah penduduk di usia kerja (15 – 64 tahun) berkontribusi 67%, dan jumlah penduduk usia tua (65 tahun ke atas) berkontribusi 17,4% dari keseluruhan jumlah penduduk di Uni Eropa. (Prathama 2012) Dari statistik yang dikeluarkan oleh European Commission, dalam dua dekade terakhir, peningkatan jumlah penduduk di usia kerja hanya mencapai 0,3%, sedangkan peningkatan jumlah penduduk usia tua mencapai 3,7%.² Hal ini tentunya akan menyebabkan semakin rendahnya tenaga kerja di Uni Eropa dan kedepannya dapat berimplikasi dalam perekonomian Uni Eropa sendiri.

Komisi Eropa merumuskan lima kebijakan penting sebagai respon terhadap perubahan demografi. (Prathama 2012) Kebijakan tersebut adalah pertama

mendukung pembaharuan demografi melalui kondisi yang lebih baik untuk keluarga dan meningkatkan rekonsiliasi dari kehidupan kerja dan keluarga, kedua meningkatkan jumlah lapangan kerja dan menambah lama masa kerja dan ketiga meningkatkan produktifitas dan performa ekonomi melalui investasi dalam bidang pendidikan dan riset. Kebijakan yang keempat adalah menerima dan mengintegrasikan imigran ke Eropa dan kelima memastikan keuangan publik yang berkelanjutan untuk menjamin uang pensiun yang memadai, perawatan kesehatan dan perawatan jangka panjang.

Meskipun Uni Eropa tengah menghadapi krisis demografi dikarenakan mulai berkurangnya jumlah usia produktif dibandingkan jumlah usia tua, maka memungkinkan Uni Eropa membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk mengisi sektor-sektor pekerjaan yang membutuhkan usia produktif tersebut. Hal ini dapat memicu kemungkinan adanya para imigran untuk terus berdatangan ke Eropa termasuk Perancis untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak dari negara asal mereka meskipun pemerintah Perancis di bawah Nicolas Sarkozy memberlakukan Kebijakan *France Immigration and Integration Law* yang memperketat masuknya imigran ke Perancis.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis mengambil rumusan masalah, yaitu : Mengapa Pemerintah Perancis dibawah Nicolas Sarkozy

memberlakukan Kebijakan *France Immigration and Integration Law* untuk memperketat masuknya imigran ke Perancis?

D. Kerangka Dasar Teoritik

Untuk menjawab Rumusan Masalah diatas, maka penulis menggunakan teori sebagai berikut:

Teori Implementasi Kebijakan Publik Donald Van Meter & Carl Van Horn: Perspektif Teoritis Proses Implementasi Kebijakan (1975) (Safkaur 2014)

Dalam tulisannya yang relatif singkat "*The Policy Implementation Process*" di dalam Jurnal *Administration and Society*, Vol 5 no. 4 tahun 1975, Donal Van Meter dan Carl Van Horn mendefinisikan implementasi sebagai :

" ... policy implementation encompasses those action by publik and privat individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in the prior policy decisions. This includes both one-tome efforts to transform decision into operational terms, as well as contuining efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions" (Van Meter & Van Horn; 1975:447).

Mereka menyatakan pentingnya membedakan isi (content) kebijakan, karena efektifitas implementasi akan sangat bervariasi bergantung tipe dan isu kebijakan tersebut, karena faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi juga akan

sangat berbeda. Menurut mereka tipe kebijakan akan memerlukan karakteristik proses, struktur dan hubungan antar berbagai faktor yang berbeda-beda pula dalam implementasinya. Mereka kemudian mengklasifikasikan kebijakan berdasarkan 2 karakteristik pokok, yakni;

1. Seberapa besar perubahan yang dituju oleh kebijakan tersebut. Karena semakin besar perubahan yang diharapkan akan berdampak pula pada perubahan organisasional pelaksanaannya.

Dalam konteks Perancis, Presiden Nicolas Sarkozy menyebut tujuan dari skema kebijakan tersebut sebagai “*selected Immigration policy*”. Kebijakan tersebut dinilai akan mampu mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial di Perancis yang dikhususkan bagi para imigran dengan tingkat pengangguran yang semakin bertambah, membuat pemerintah sulit untuk mengakomodasi baik dari segi bantuan sosial dan meredakan ketegangan antara imigran dengan warga asli Perancis. Skema kebijakan keimigrasian baru tersebut di kenal dengan Kebijakan *France Immigration and Integration Law*. (Fudzcha Putri Jazilah 2012). Melalui Skema kebijakan baru tersebut kemudian pada Mei 2006 Pemerintah Mulai mengadopsi kebijakan tersebut untuk menjadi Undang-Undang.

2. Seberapa besar penerimaan atas tujuan kebijakan dari para aktor implementasi.

Nicolas Sarkozy yang didukung oleh Partai Union for a Popular Movement (UMP) sebagai partai pemerintah yang berkuasa sejak tahun 1995 terus mempertahankan eksistensinya dengan berusaha mengeluarkan program-program kebijakan partai yang cenderung mendapat dukungan penuh dari rakyat Perancis.

Kontribusi Sarkozy dalam pemerintahan telah dilakukan sejak tahun 2002 khususnya terkait dengan penanganan permasalahan imigran, dimana pada masa presiden diwaktu itu Nicolas Sarkozy menjabat sebagai menteri luar negeri Perancis, yang dinaungi oleh Partai UMP sebagai partai pemerintah di masa itu. Perjalanan karir politik Nicolas Sarkozy yang telah lama bersama partai UMP dan ditambah sebagai pemimpin partai telah mempengaruhi pemikiran-pemikiran Sarkozy sebagai seorang yang beraliran konservatif kanan tengah.

Meski model yang diajukan oleh Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya partisipasi implementor dalam penyusunan tujuan kebijakan, namun pendekatan mereka terkatagori pendekatan Top-down, sebab dalam bukunya mereka mengatakan bahwa standar dan tujuan kebijakan dikomunikasikan pada implementor melalui jaringan interorganisasional, atau dengan perkataan lain, yang terpenting adalah para implementor memahami dan menyetujui tujuan dan standar yang telah ditetapkan, bukan turut menentukan tujuan dan standar tersebut.

Berbeda dengan penulis lain yang mencoba memberikan pendekatan preskriptif (Christopher Hood, misalnya), mereka mencoba memberikan kerangka

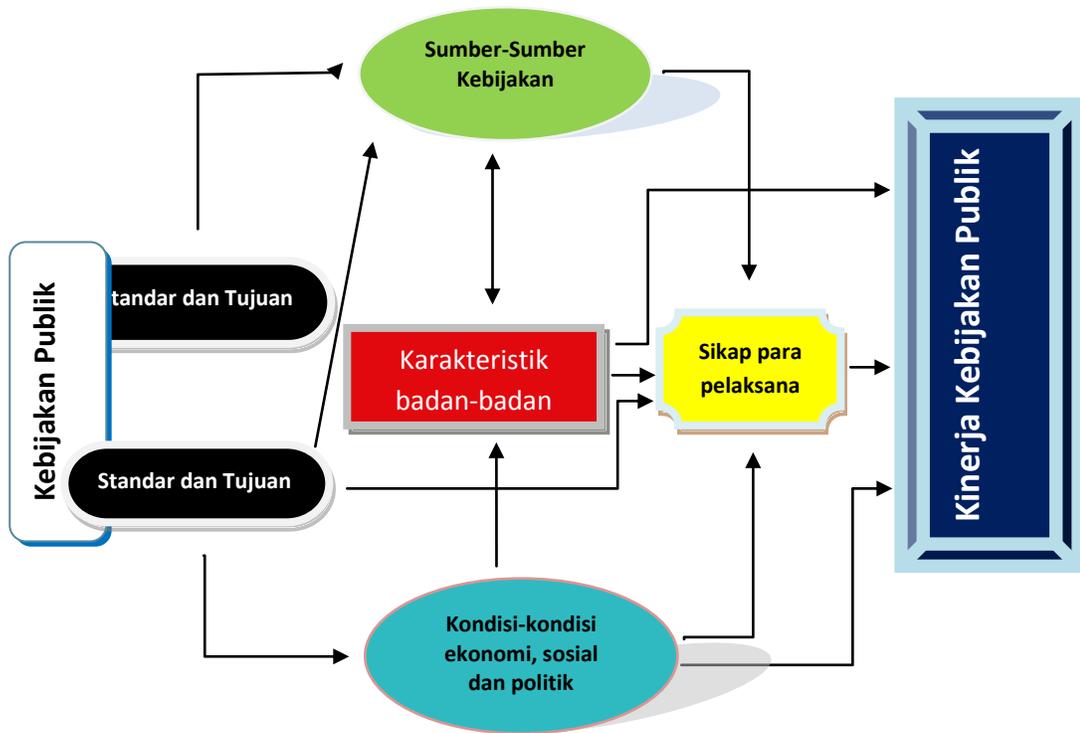
teoritis untuk menganalisis proses implementasi, sehingga dapat mengenali simpul-simpul yang bisa menjadi penghambat keberhasilan implementasi. Selanjutnya Van meter dan Van Horn mengatakan bahwa ada 6 (enam) variabel (atau kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Variabel-variabel tersebut adalah :

1. Tujuan Kebijakan dan Standar yang jelas. yakni rincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
2. Sumberdaya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi)
3. Kualitas Hubungan Inter-Organisasional. Keberhasilan implementasi seringkali menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
4. Karakteristik Lembaga/organisasi pelaksana (termasuk di dalamnya: kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarchis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, dan keterkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan, etc)

5. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi, (apakah sumberdaya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elit mendukung implementasi; dlsb)
6. Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk di dalamnya : pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan; sikap mereka atas kebijakan tsb; serta intensitas sikap tsb)

Lebih jelasnya model mereka tampak sebagai berikut:

Gambar I.1. Proses Implementasi



Karena hanya merupakan sebuah artikel, maka penjelasan Van Meter dan Van Horn mengenai model mereka kurang rinci, sehingga menurut Mazmanian dan Sabatier, model ini memiliki keterbatasan, yakni hanya sesuai untuk digunakan pada program yang bertujuan mendistribusikan barang dan pelayanan publik dan terlalu abstrak, dengan kategori yang tidak jelas bentuknya serta variabelnya sulit untuk dioperasionalkan. Namun sebagai sebuah artikel, gaung tulisan mereka cukup memancing minat para pemerhati implementasi, sehingga model mereka selalu disebut-sebut dalam karya penulis Implementasi berikutnya. Tidak berlebihan jika dikatakan karya atau model yang mereka maksudkan sebagai upaya memberikan sebuah perspektif teori bagi studi implementasi yang dirasakan sangat kurang, telah cukup berhasil menggugah para akademisi lainnya untuk mengikuti jejak mereka, sehingga muncul berbagai model-model implementasi kebijakan.

E. Hipotesa

Dari rumusan masalah dan kerang teori yang digunakan maka penulis dapat menarik hipotesis bahwa Pemerintah Perancis dibawah Nicolas Sarkozy memberlakukan *France Immigration and Integration Law* untuk memperketat masuknya imigran ke Perancis karena kondisi politik domestik sebagai berikut:

1. Imigran menimbulkan berbagai permasalahan social di Perancis sehingga membuat Presiden Nicolas Sarkozy berkeinginan membatasi jumlah imigran

yang masuk dan hanya imigran yang memiliki “High Qualification” yang dapat masuk ke negara Perancis.

2. Tekanan Partai UMP sebagai partai pemerintah pemenang pemilu yang beraliran tengah kanan yang ingin negara Perancis perlu memiliki persyaratan yang ketat untuk para calon imigran.

F. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan mengenai pengaruh sikap Prancis dalam kebijakan imigrasi.
2. Berusaha mengkaji, membahas sekaligus memberikan gambaran (deskripsi) secara objektif dan empiris mengenai sikap Prancis dalam kebijakan imigrasi.
3. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S-I) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis meneliti bagaimana kebijakan imigrasi pemerintah Perancis di era Presiden Nicolas Sarkozy. Terciptanya kebijakan imigrasi Perancis di era presiden Nicolas Sarkozy tidak lepas dari masalah domestik Perancis yang membuat Presiden Nicholas Sarkozy membuat kebijakan *France Immigration and Integration Law*. Pada tahun tersebut kebijakan imigrasi Perancis di era Sarkozy

memang lebih bersifat agresif terhadap imigran disebabkan Prancis yang sangat fokus dengan penanganan imigran pada tahun 2007 hingga tahun 2012. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan penulis dalam mengklasifikasikan data-data yang ada.

H. Metodologi Penelitian

Metode yang dipakai oleh penulis adalah metode kualitatif yang kemudian dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data sekunder, yang dapat diperoleh dengan menggunakan studi literature. Bahan-bahan yang dipergunakan dari:

- Buku-buku literature yang relevan dengan objek studi yang diteliti.
- Jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan studi ini.
- Artikel-artikel ilmiah yang diambil dari berbagai sumber situs internet.

Setelah data tersebut diperoleh kemudian dianalisa dengan metode discourse analysis sehingga dapat menunjukkan titik terang untuk menghimpun hipotesa.

I. Rencana Sistematika Penelitian

Bab I : Memuat pendahuluan yang terdiri dari : Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metodologi penelitian dan Rencana Sistematika Penelitian.

Bab II : Menjelaskan tentang isu imigran Perancis sebelum dan selama dipimpin oleh Presiden Nicolas Sarkozy.

Bab III : Menjelaskan tentang kebijakan Presiden Nicolas Sarkozy terhadap imigran.

Bab IV : Menjelaskan tentang konteks politik domestic Perancis yang mempengaruhi Sarkozy dalam mengambil keputusan.

Bab V : Penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini pada bab-bab sebelumnya.